

BAB V

KESIMPULAN

Muslim di Australia memiliki sejarah panjang dan kaya yang diperkirakan hadir sebelum pemukiman Eropa. Beberapa pengunjung awal Australia adalah Muslim yang datang dari Indonesia timur. Mereka datang berniat untuk mencari mata pencaharian sebagai nelayan ataupun pedagang.

Selain dari Indonesia ada juga penunggang unta dari Afghanistan. Australia merupakan sebuah negara yang sebagian besar tanahnya berupa padang pasir dengan temperatur yang sangat tinggi dan sedikit sumber mata air, sehingga unta dijadikan sebagai hewan pengangkut barang karena apabila menggunakan hewan kuda sebagai alat transportasi sangatlah tidak cocok. Dalam hal menunggang unta dibutuhkan orang-orang yang ahli, sehingga mulai banyak berdatangan Muslim dari Afghanistan ke Australia. mereka membangun hubungan deng daratan Australia sejak abad 16 dan 17.

Australia adalah salah satu negara yang memiliki penduduk beraneka ragam di dunia dengan jumlah populasi sekitar 22 juta orang. Pribumi Australian terdiri dari 2,5 persen dari keseluruhan populasi. Lebih dari seperempat penduduk Australia merupakan Warga Negara Asing dan telah bermigrasi lebih dari 200 Negara. Keanekaragaman populasi menjadikan Australia sebagai negara yang memiliki kekayaan bahasa, kepercayaan, tradisi, dan budaya yang beraneka-ragam.

Secara umum, Australia adalah masyarakat egalitarian. Ini berarti bahwa tidak ada perbedaan kelas yang formal atau mendarah daging pada masyarakat Australia, seperti di negara-negara lain. Seluruh warga setara di bawah hukum di Australia dan seluruh warga Australia memiliki hak untuk dihargai dan diperlakukan secara wajar.

Kebebasan untuk memeluk agama dijamin oleh Undang-Undang Dasar Australia pasal 116, yang melarang pemerintah federal untuk membuat undang-undang mendirikan agama, memaksakan ajaran agama, atau melarang pelaksanaan ajaran agama dengan bebas. Setiap orang bebas menyatakan

keanekaragamannya, selama hal tersebut tidak melanggar hukum dan tidak memancing kebencian terhadap agama.

Australia adalah negara yang sebagian besar penduduknya menganut agama Kristen, dengan sekitar 64 persen penduduk Australia mengaku sebagai penganut agama Kristen. Namun, agama-agama besar lainnya juga memiliki penganut, yang mencerminkan bahwa masyarakat Australia majemuk secara budaya. Menurut hasil sensus tahun 2016 Muslim di Australia sejak 26 tahun terakhir mengalami peningkatan, jumlah penduduk Muslim di Australia meningkat menjadi 2,6 persen dibandingkan pada tahun 1991 yang hanya memperoleh presentase 2,2%.

Selama ini, pemerintah Australia dan masyarakat Australia menghormati pelaksanaan atas multikultur Australia. Namun ada beberapa isu yang menjadikan hubungan muslim dengan non-Muslim memburuk salah satunya ketika adanya isu internasional yang merupakan generalisasi berlebihan atas suatu persoalan, atau stigma atas sebuah kelompok Muslim Australia yang kemungkinan dipengaruhi oleh opini-opini yang dibangun oleh sebagian besar media masa. Masyarakat Australia beranggapan bahwa Muslim adalah teroris yang akan melakukan tindak kekerasan. Padahal terorisme adalah perbuatan individu yang tidak bisa disangkut pautkan dengan Muslim.

Seiring dengan perkembangan Muslim di Australia, saat ini sudah banyak sekolah-sekolah Muslim di Australia yang memiliki kurikulum yang sama dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Masjid pun sudah mulai banyak dijumpai di berbagai kota-kota besar meskipun awalnya masjid dianggap sebagai hal yang mengganggu bagi umat Australia. Karena dikhawatirkan masjid akan mengumandangkan adzan sebanyak 5 kali dalam sehari. Selain itu terdapat beberapa organisasi Muslim yang berjalan di Australia seperti AFIC (Australian Federation of Islamic Council), Federation of Islamic Societies, Moslem Student Association, Moslem Women's Center dan masih banyak lagi.

Pemerintah Australia menganggap bahwa kedaulatan Tuhan tidak bisa hidup dalam praktik politik di Australia.

Mereka juga cenderung melakukan liberalisasi komunitas Muslim dengan tujuan menanamkan nilai-nilai liberal dan peradaban barat. Hal ini berarti bahwa pemerintah Australia tidak ikut campur masalah keagamaan rakyatnya, setiap rakyat bebas untuk memilih agama apa yang ingin mereka anut, bahkan masyarakat Australia juga bebas untuk memilih tidak memiliki agama (atheisme)

Sebagai kaum yang Minoritas di Australia, Muslim disana tidak pernah melakukan demonstrasi dan melakukan penyitaan terhadap perjudian, prostitusi, diskotik, kaum gay/lesbi, toko minuman keras, bar, panti pijat, kehidupan malam dan kemaksiatan lainnya, meskipun disini mereka tidak setuju dengan adanya hal tersebut. Alasannya, mereka sadar bahwa Australia adalah negara plural, baik agama, ras, suku bangsa, tradisi, sistem kepercayaan yang berbeda-beda dalam menyikapi isu tersebut. Disamping itu, mereka mempunyai hak dan kebebasan untuk melakukan tindakan dan perbuatan sesuai dengan pandangan hidup mereka.

Sebagai seorang Muslim mengkonsumsi makanan halal merupakan sebuah kewajiban. Di Australia Muslim merupakan agama yang minoritas sehingga sering kali seorang Muslim kesulitan dalam mendapatkan makanan halal. Kesulitan ini bermula pada aspek sertifikat halal. Terlebih banyak pemerintah beranggapan bahwa melakukan sertifikasi halal membutuhkan biaya yang besar dibandingkan kita harus membeli produknya. Selain itu banyak pihak-pihak yang beranggapan bahwa dana yang digunakan untuk sertifikasi halal nantinya akan digunakan untuk tindakan terorisme. Hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi umat Muslim di Australia untuk mendapatkan produk halal.

Produk yang bersertifikat halal di Australia dapat berasal dari dua sumber; produk dalam negeri yang diproduksi secara lokal dan disertifikasi oleh bisnis lokal, atau produk impor yang telah disertifikasi diluar negeri.

Pada tahun 2009 Program Halal Pemerintah Australia *AQIS (Australian Quarantine and Inspection Service) Meat Notice* memberikan sebuah pedoman untuk persiapan, identifikasi, penyimpanan dan sertifikasi ekspor daging halal

merah dan produk daging merah. Hal ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada semua perusahaan untuk penyembelihan ternak dan persiapan, identifikasi, pengolahan, penyimpanan, segregasi dan sertifikasi daging halal dan produk daging merah yang selanjutnya akan disebut dengan daging halal untuk diekspor ke semua negara pengimpor.

Dalam hal sertifikasi ini organisasi Muslim di Australia yakni AIO (approved Islamic Organization) menjalin kerjasama dengan pemerintah terkait sertifikasi halal. Dimana AIO bertugas sebagai bidang pengawasan terhadap produk yang akan di sertifikasi, dan segala bentuk yang berhubungan dengan keagamaan AIO bertanggung jawab penuh, karena pemerintah tidak ikut campur mengenai hal yang bersakutan dengan syariat. Dalam hal ini peran pemerintah adalah melakukan pengesahan dan memberikan “*stamp halal*” pada kemasan setiap produk halal.

Australia merupakan sebuah negara produksi ternak daging terbesar di dunia. Hal ini menjadikan Australia harus memenuhi permintaan produsen. Dengan adanya daging ekspor yang di konsumsi oleh negara Muslim, menjadikan Australia harus memiliki sertifikasi halal terhadap produk konsumsinya, hal ini dikarenakan permintaan yang diajukan oleh negara Muslim itu sendiri. Ini menjadi sebuah strategi diplomasi perdagangan Australia agar produk yang mereka hasilkan bisa dinikmati oleh negara Muslim. Karena sebagian ekspor daging Australia merupakan daging yang akan di konsumsi oleh negara-negara Muslim.

Kegiatan ekspor daging dari Australia ke berbagai negara merupakan kegiatan G to G (government to government) sehingga setiap keputusan atau kebijakan negara pengimpor harus disampaikan ke lembaga sertifikasi halal di Australia melalui pemerintah Australia. Kebijakan pemerintah dalam sertifikasi halal ini yaitu :

1. Pemerintah Australia memiliki program AGAHP (*Australian Government Authorised Halal Program*) yang merupakan salah satu dari bagian program AQIS.

2. Pemerintah Australia tidak campur tangan mengenai permasalahan syariah seperti dalam proses penyembelihannya. Pemerintah hanya bertanggung jawab untuk mengesahkan barang yang menjadi barang permintaan dari negara ekspor bahwa barang tersebut halal. Hal ini sudah diserahkan kepada AIO yang menangani kehalalan suatu produk.
3. Pemerintah Australia melakukan pemeriksaan ke 3 elemen yang terkait dengan kegiatan ekspor daging halal setiap 6 bulan sekali.
4. Pemerintah bertanggung jawab atas stamp halal terhadap suatu produk. Dimana harus ada *stamp halal* pada setiap kemasan atau pada makanan itu sendiri.
5. Pemerintah hanya bertanggung jawab atas kehalalan yang di produksi untuk produk yang akan di ekspor, ini berarti bahwa setiap barang produksi yang beredar di pasar domestik pemerintah tidak campur tangan